



# LAPORAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
**2022**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas berkah dan rahmat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas berkah dan rahmat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Singkawang, 14 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Singkawang



**EVAN ERNANDA, S. Kom**

Pembina

NIP. 19710312 200502 1 001

3.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	28
B. PERJANJIAN KINERJA .....	30
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	36
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	36
B. REALISASI ANGGARAN .....	52
1. Pendapatan Tahun 2021 .....	52
2. Realisasi Belanja .....	54
 BAB IV PENUTUP .....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	5
-------------	--	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan .....	13
Tabel 1.2.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang .....	14
Tabel 1.3.	Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	15
Tabel 2.1.	Target Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang .....	28
Tabel 2.2.	Target Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	28
Tabel 2.3.	Target Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	29
Tabel 2.4.	Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja.....	33
Tabel 2.6.	Perjanjian Kinerja Perubahan.....	34
Tabel 3.1.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	37
Tabel 3.2.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	38
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2020, 2021, 2022 dengan Target Akhir 2022 .....	39
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	41
Tabel 3.5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	42

Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2020, 2021, 2022 dengan Target Akhir 2022 .....	43
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	45
Tabel 3.8.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	46
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2020, 2021, 2022 dengan Target Akhir 2022 .....	47
Tabel 3.10.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	48
Tabel 3.11.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	50
Tabel 3.12.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2020, 2021, 2022 dengan Target Akhir 2022 .....	51
Tabel 3.13.	Realisasi PAD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	52
Tabel 3.14.	Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	54
Tabel 3.15.	Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 .....	55



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1.	Sumber daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan .....	13
Diagram 1.2.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang .....	14
Diagram 1.3.	Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan dilaksanakannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana kabupaten dan kota memiliki otonomi yang luas dan disesuaikan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi pemekaran urusan otonomi daerah yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor/Departemen/Instansi Vertikal di daerah. Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public good and service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama yaitu : transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja instansi pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok, maka perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2022 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2022, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Dinas Kominfo Kota Singkawang sebagai pelaksana urusan bidang komunikasi dan informatika mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang

terjadi ke depannya. Laporan Kinerja Dinas Kominfo Kota Singkawang Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan inilah maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kominfo Kota Singkawang Tahun 2021 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

## **2. Susunan Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, yang membawahi :

### **1. Kepala Dinas**

### **2. Sekretariat membawahi :**

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

### **3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :**

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

**4. Bidang *E-Government* dan Telematika membawahi :**

- a. Seksi Infrastruktur dan Layanan E-Government
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika

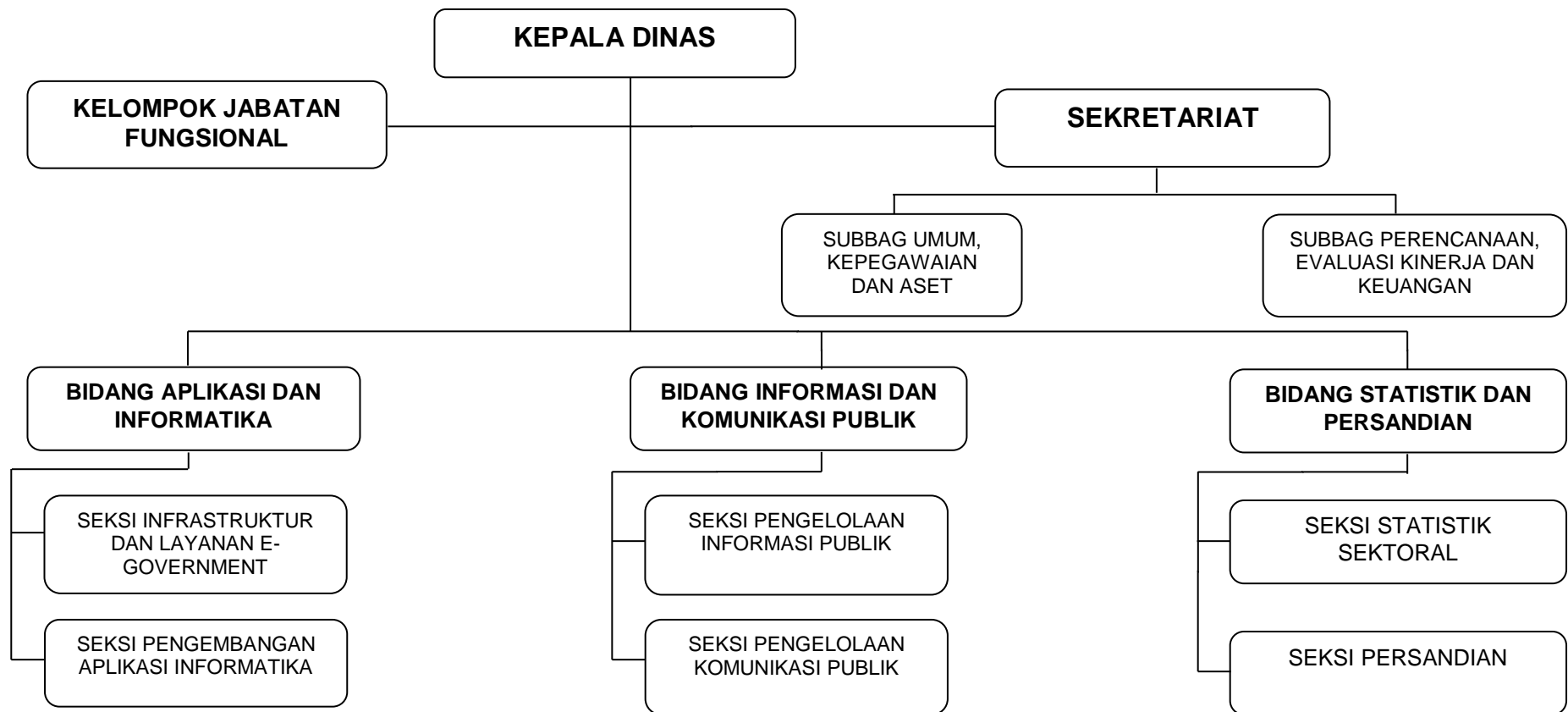
**5. Bidang *Statistik dan Persandian* membawahi :**

- a. Seksi Statistik Sektoral
- b. Seksi Persandian

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang memiliki Struktur Organisasi dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**



## **2.1. Kepala Dinas**

### **a. Tugas**

Memimpin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Fungsi**

- Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan administrasi Dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sekretariat**

### **a. Tugas**

Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordiasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian dan aset, perencanaan dan evaluasi kinerja, serta keuangan.

### **b. Fungsi**

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariat; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset** , mempunyai tugas:

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan aset.

- 2) **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

## **2.3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

### **a. Tugas**

Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik meliputi pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

### **b. Fungsi**

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik.



- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, Yaitu : Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang pengelolaan informasi publik.

2) **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang pengelolaan komunikasi publik.

## **2.4. Bidang Aplikasi dan Informatika**

### **a. Tugas**

Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Aplikasi dan Informatika yang meliputi infrastruktur dan

layanan e-government serta pengembangan aplikasi informatika.

**b. Fungsi :**

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi dan informatika;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan layanan e-government serta pengembangan aplikasi informatika;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan layanan e-government serta pengembangan aplikasi informatika;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan layanan e-government serta pengembangan aplikasi informatika;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, yaitu : Infrastruktur dan Layanan E-Government, Pengembangan Aplikasi Informatika, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

**1) Seksi Infrastruktur dan Layanan E-Government,**  
mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang infrastruktur dan layanan e-government.

2) **Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang pengembangan aplikasi informatika.

## **2.5. Bidang Statistik dan Persandian**

### **a. Tugas**

Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian meliputi Statistik Sektoral dan Persandian.

### **b. Fungsi :**

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang statistik dan persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang statistik sektoral dan persandian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang statistik sektoral dan persandian;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang statistik sektoral dan persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, yaitu : Seksi Statistik Sektoral dan Seksi Persandian, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) **Seksi Statistik Sektoral**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang statistik sektoral.

2) **Seksi Persandian**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan urusan persandian.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sedangkan susunan dan tata kerja berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

#### **a. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan administrasi Dinas;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, ketersediaan sumber daya aparatur / personil yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor penting yang harus dipenuhi. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh personil dinas yang tersedia. Dalam kaitan ini, permasalahan yang dihadapi dinas adalah terbatasnya jumlah personil yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kekurangan jumlah personil sangat dirasakan ketika dihadapkan pada suatu tugas yang menjadi lingkup bidang tertentu, terpaksa dilaksanakan dengan/harus mendaya-gunakan sebagian/seluruh personil bidang lain yang pada skala tertentu dapat berakibat tertundanya tugas pokok personil yang bersangkutan.

Dari segi kualitas, dirasakan disiplin, kompetensi dan kemampuan personil masih belum sepenuhnya memadai. Pelaksanaan tugas dan permasalahan lapangan penyelesaiannya terkesan lambat, tidak tuntas dan sering berdampak pada beban bagi atasan. Pada sisi lain upaya untuk meningkatkan kemampuan personil melalui program diklat teknis dan diklat fungsional belum mendapat perhatian dan penghargaan yang semestinya karena kurangnya dukungan anggaran yang disediakan.

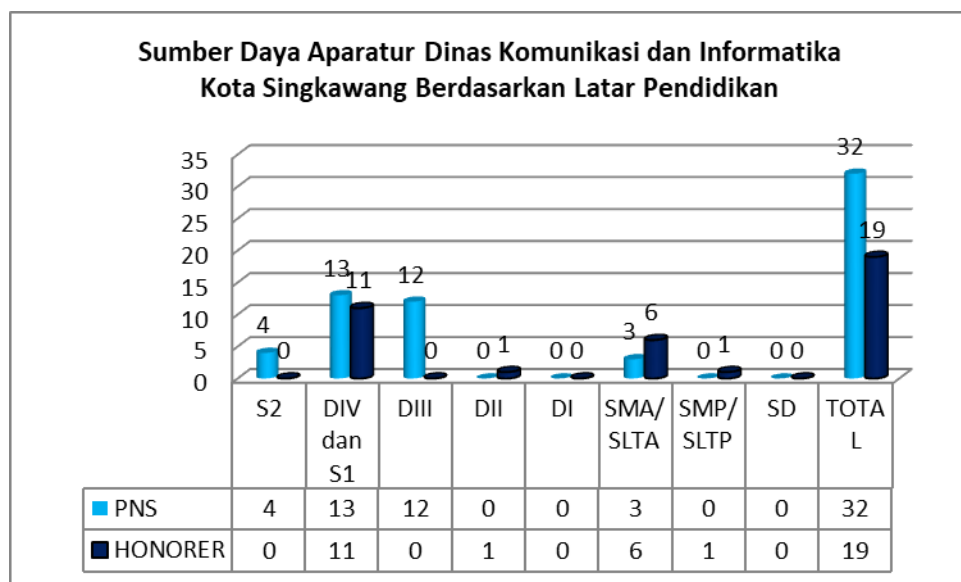
Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sampai dengan Desember 2022 berjumlah 51 orang yang terdiri dari 32 orang PNS, 19 orang Honorer yang tersebar pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menurut latar pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan**

NO.	LATAR PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	
		PNS	HONORER
1.	S2	4	-
2.	DIV dan S1	13	11
3.	DIII	12	-
4.	DII	-	1
5.	DI	-	-
6.	SMA/SLTA	3	6
7.	SMP/SLTP	-	1
8.	SD	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>	<b>19</b>

*Sumber : DUK Diskominfo per Desember 2022*

**Diagram 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan**



Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknis relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknis. Dari

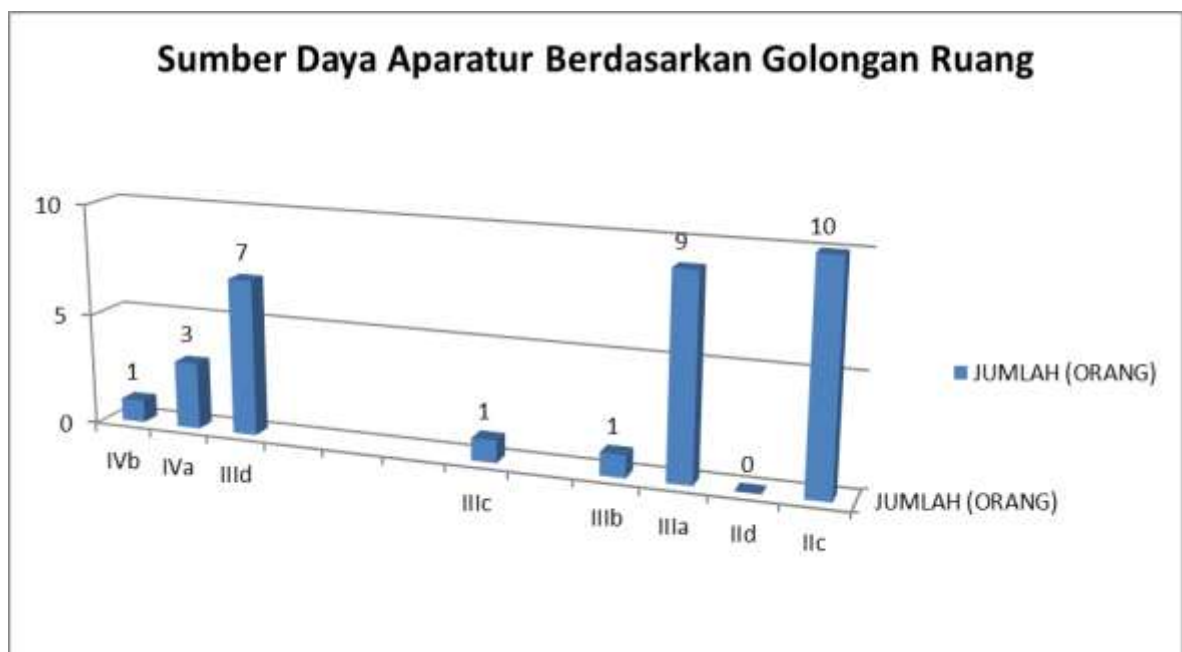
tingkatan pendidikan, jumlah pegawai didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat S1.

**Tabel 1.2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang**

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	IVb	1
2.	IVa	3
3.	IIId	7
4.	IIIf	1
5.	IIIf	1
6.	IIIa	9
7.	IIId	0
8.	IIf	10
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>

*Sumber : DUK Diskominfo per Desember 2022*

**Diagram 1.2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang**



## 5. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang pada tahun 2022 dibiayai oleh dana belanja yang diperoleh dari dana APBD Kota Singkawang. Jumlah

LAPORAN KINERJA DISKOMINFO KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

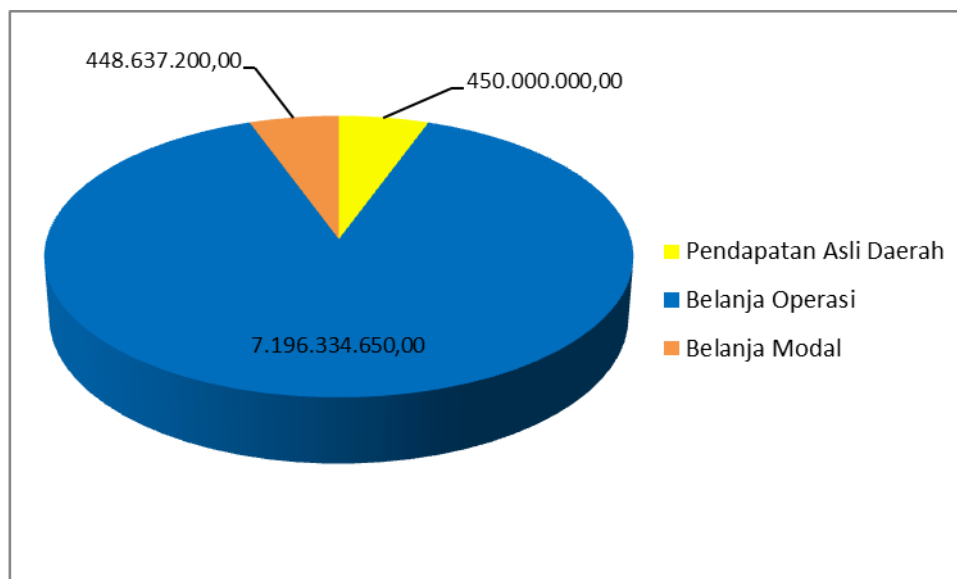
sumber dana keuangan dengan *surplus* ( *defisit* ) sebelum perubahan Rp.7.399.906.922,00 dan setelah perubahan sebesar Rp.10.523.258.592,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3. Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO.	URAIAN	Anggaran Diskominfo
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	Rp. <b>450.000.000,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 450.000.000,00
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>	Rp. <b>7.644.971.850,00</b>
2.1	Belanja Operasi	Rp. 7.196.334.650,00
2.2	Belanja Modal	Rp. 448.637.200,00

*Sumber : DPA Diskominfo 2022*

**Diagram 1.3. Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika**



*Sumber : DPA Diskominfo 2022*

## 6. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sebagaimana yang diharapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selain atas usaha para personil dan dukungan dari semua pihak juga tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki.



Data sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang terlampir.

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)**

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

### **1. Isu *Sustainable Development Goals* (SDG's)**

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:

- a) Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik

bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sementara itu, kesepakatan Global *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan.

## **2. Isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024**

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi

untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

##### **1. Visi**

Secara nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

Adapun visi kepala daerah terpilih periode 2018-2022 adalah :

#### **“Singkawang HEBAT 2022”**

Kata **“HEBAT”** yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

**H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya; **E**konomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri; **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan; **A**dil dan Merata dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan; **T**erdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Visi tersebut memiliki elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan dan jasa yaitu **hebat** dan **sejahtera**.



Visi tersebut mengandung maksud bahwa Singkawang sebagai kota yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat mengandung arti bahwa masyarakat Kota Singkawang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kota Singkawang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

- a. Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.  
Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- b. Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri.  
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
- c. Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.  
Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.
- d. Adil dan Merata dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan.  
Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka.

Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

- e. Terdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik-beratkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota.

Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata.

Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang.

Pengembangan kota wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif diberbagai sektor jasa, perdagangan dan industri

kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

Berdasarkan visi tersebut ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- 5) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;
- 7) Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Dari Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka dalam merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2018-2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Misi ke-empat yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi. Tujuannya : “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan Indikator Tujuan berupa “Indeks Reformasi Birokrasi”



serta Sasaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Sasaran yaitu : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM); 2. **Indeks SPBE**; dan 3. Nilai LPPD.

## **2. Misi**

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018–2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal. Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018–2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki masyarakat dan menjadi aset yang potensial dalam membangun semangat kebersamaan.

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju

pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas;

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga

dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

Tujuan merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan perangkat daerah.

Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Dinas Kominfo mengampu Misi ke-4 Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Periode 2018 – 2022 yakni **Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.**

Adapun Tujuan untuk mencapai Misi ke-4 tersebut yakni “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan Indikator Tujuan berupa “Indeks Reformasi Birokrasi” serta Sasaran Strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Sasaran yaitu : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM); 2. **Indeks SPBE**; dan 3. Nilai LPPD.

Untuk mencapai Misi ke-4 tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan, sasaran strategis beserta indikator kinerja utama sebagai berikut :

### **3.1 TUJUAN**

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Misi 4 yaitu :

1. Terintegrasinya Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Singkawang.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah :

1. Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

### **3.2 SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran strategis yakni :

1. Terwujudnya e-government yang terintegrasi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik;
3. Meningkatnya keamanan informasi;
4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut yaitu adalah :

1. Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-government;
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik;
3. Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah;
4. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
5. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

### 3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dari tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu tahun 2018-2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Singkawang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Capaian setiap Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	1,7 (KURANG)	1,8 (CUKUP)	2 (CUKUP)	2,25 (CUKUP)	2,5 (CUKUP)

**Tabel 2.2.**  
**Target Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian setiap Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terintegrasinya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Layanan SPBE	-	-	Level 2	Level 2	Level 2

	di Kota Singkawang						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

**Tabel 2.3.**  
**Target Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Capaian setiap Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-goverment	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	83% (BAIK)	84% (BAIK)	85% (BAIK)	86% (BAIK)	87% (BAIK)
3.	Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	-	-	3,45%	82,75 %	100%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	BB	BB
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	BB	BB

**Tabel 2.4.**  
**Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1.	Terintegrasinya Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Singkawang	Layanan SPBE	Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-goverment
2.			Meningkatnya kualitas pelayanan data dan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik

			informasi publik	
3.			Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah
4.			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
				Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah

## B. PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib untuk menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja setiap satuan kerja menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud keseimbangan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yakni :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja**

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-goverment	29 PD	Program Aplikasi Informatika	1.813.276.000
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	87 (BAIK)	• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	174.455.200
			• Program Informasi dan Komunikasi Publik	547.409.800
Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	29 PD	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	16.129.700

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang	4.239.376.509
	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Perubahan**

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-goverment	29 PD	Program Aplikasi Informatika	1.794.151.200
Meningkatnya kualitas pelayanan data	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	87 (BAIK)	• Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	174.441.200

dan informasi publik			• Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.212.416.300
Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	29 PD	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	36.031.500
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.427.931.650
	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB		

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**



Kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan implementasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku pelaksana sebagian kebijakan dari pemerintah daerah, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Adapun data-data dan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai berikut :

- 1. Sasaran Strategis Terwujudnya e-government yang terintegrasi**
  - a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022**

Tabel 3.1.  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government	29 OPD	29 OPD	100%

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Sesuai dengan Tabel 3.1 Sasaran Strategis Terwujudnya e-government dari 29 (dua puluh Sembilan) OPD sebagai sasaran telah terintegrasi semua sesuai dengan target, dengan kata lain capaiannya adalah 100%.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

## 1) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2.

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Aplikasi Informatika	1.794.151.200	1.730.314.892	96,44	100,5%	4,06%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,44% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,5%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 4,06%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

## 2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan :
  - a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
    - Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota capaian 100%.
    - Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah capaian 100%.
  - b. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten / kota, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik capaian 100%.
- Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik capaian 100%.
- Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah capaian 100%.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE capaian 104%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.3.

Perbandingan realisasi kinerja 2020, 2021, 2022 dengan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2022
		2020	2021	2022	
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indikator Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government mencapai target, hal ini disebabkan :

1. Semua perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang (berjumlah 29 OPD) sudah terintegrasi dengan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dimana masing-masing perangkat daerah sudah memiliki website dan email dinas yang terhubung dengan portal singkawangkota.go.id, sehingga publik yang akan mengakses informasi dari OPD manapun cukup masuk melalui 1 portal saja dan dapat terhubung dengan semua OPD yang ada di Kota Singkawang.

2. Jumlah Subdomain Singkawang sd Desember 2022 = 93 Sub Domain singkawangkota.go.id.
3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah = 100 Mbps untuk 19 Server OPD, 46 CCTV, 71 titik Jaringan Intra, TCM, livestreaming, PKB/KIR, Back Up Disdukcapil, PPDB, Back Up MPP.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik = 3 integrasi (firehotspot, ISPU, database e-absen).
5. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik = 3 Aplikasi (Sipohon, Inventori, Backend Firehotspot).
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah = 18 Aplikasi. Total Aplikasi di Server Kominfo = 57 & Website = 30.

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government, antara lain :

- Server sebanyak 20 buah (Kondisi Baik 13, Kurang baik 7, Rusak 2).
- Kapasitas Bandwidth Utama kurang (perlu tambahan).
- Bandwidth Dedicated tidak memiliki back up.
- CCTV belum semua menggunakan kabel Fiber Optik (FO).
- Tidak adanya kendaraan operasional untuk pengendalian menara telekomunikasi dan jaringan intra.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Penggantian server dengan kondisi kurang baik sebanyak 7 server, terutama segera dilakukan penggantian server untuk kondisi rusak sebanyak 2 server.
- Penambahan kapasitas bandwidth utama yang masih kurang dan sangat diperlukan.
- Penambahan back up bandwidth dedicated, sehingga apabila terjadi kerusakan/error/crash pada 1 bandwidth maka dengan adanya backup bisa dialihkan ke bandwidth lainnya, sehingga tidak



mengganggu aktifitas (aktifitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar).

- Penambahan kabel Fiber Optik (FO) untuk CCTV agar monitoring CCTV di beberapa titik kota dapat terus terpantau dengan lancar tanpa ada gangguan jaringan.
- Pengadaan kendaraan operasional untuk monitoring pengendalian 124 menara telekomunikasi dan jaringan intra di 5 kecamatan di Kota Singkawang.

## **2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik**

### **a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022**

Tabel 3.4.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	87 (BAIK)	87,05 (BAIK)	100,05%

Pada Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik dengan Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik target Tahun 2022 adalah 87 (Baik) realisasinya adalah 86,05 (Baik) yang berarti capaiannya adalah 100,05%.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

**1) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;**

Tabel 3.5.

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Informasi dan Komunikasi Publik	1.212.416.300	1.117.448.495	92,16	106,63%	14,47%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	174.441.200	160.678.612	92,11	100%	7,89%
<b>Rata - Rata</b>				<b>92,13</b>	<b>103,31%</b>	<b>11,18%</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92,13% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 103,31%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 11,18%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja 106,63%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
  - Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik capaian 100%.
  - Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik capaian 112,33%.
  - Pelayanan informasi publik capaian 103,29%.

- Layanan hubungan media capaian 108,89%.
  - Kemitraan dengan pemangku kepentingan capaian 100%.
  - Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik capaian 100%.
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral capaian 100%.

Adapun program/kegiatan yang kurang mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media dengan capaian kinerja sebesar 58,33%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.6.

Perbandingan realisasi kinerja 2020, 2021, 2022 dengan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2022
		2020	2021	2022	
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	85,47 (BAIK)	86,33 (BAIK)	87,05 (BAIK)	87 (BAIK)

Sedangkan pada Sasaran kedua yakni Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik dengan Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik, realisasi dari

tahun 2020, 2021 dan 2022 **MENINGKAT** yakni pada tahun 2020 85,47 (Baik), tahun 2021 86,33 (Baik) dan tahun 2022 87,05 (Baik).

Selain itu, untuk menunjang sasaran strategis kedua Dinas Kominfo melalui Bidang Statistik telah menyusun Buku Meta Data dan Buku Kompilasi Statistik Sektor Pemerintah Kota Singkawang tahun 2022.

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik melebihi target, hal ini disebabkan :

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik se-Kalimantan Barat tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Singkawang memperoleh Nilai “89,93” **MENINGKAT** dari tahun 2021 dengan nilai “85,87” (sebesar 4,04) dan masuk Kualifikasi “Informatif” (Zona Hijau), dan untuk peringkat sebagai Badan publik Informatif Kabupaten/Kota se-Kalbar mengalami peningkatan yakni pada tahun 2021 mendapat peringkat ke-11 dan untuk tahun 2022 mendapat peringkat ke-10 dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar (naik satu peringkat);
2. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kominfo mengadakan MoU (perjanjian kerjasama) dengan Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian (BBPSDMP) Kominfo Medan melalui kegiatan DTS (Digital Talent Scholarship) yang terdiri dari : 1. DEA = Digital Entrepreneurship Academy 1 - 5 sebanyak 486 peserta; 2. TA = Thematic Academy (TA eks pekerja migran 1 & 2, TA ponpes/madrasah) sebanyak 231 peserta; 3. VSGA = Vocational School Graduate Academy 1 & 2 sebanyak 133 peserta; 4. Pelatihan TIK untuk GOW dan PKK sebanyak 100 peserta; dan 5. GTA (Government Transformation Academy) sebanyak 108 peserta. Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.058 peserta.
3. Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kominfo melaunching NTPD (Nomor Tunggal Panggilan Darurat) SIGAP (Singkawang Tanggap) 112 yang terdiri dari layanan bencana alam, pencurian, kebakaran,

banjir, kecelakaan, hewan buas, ambulance gawat darurat, tindak criminal, terorisme, pohon tumbang dan kerusakan konstruksi bangunan yang menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat.

4. Penambahan SDM dengan keahlian khusus seperti programmer, desain grafis dan spesialis konten.
5. Tersedianya Buku Indikator Meta Data Kota Singkawang yang memuat data indikator sebagai acuan perangkat daerah dalam perumusan dan perhitungan capaian program kegiatan.

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik, antara lain :

- Kurangnya partisipasi masyarakat Kota Singkawang dalam meminta informasi publik, padahal sudah disediakan wadah untuk meminta informasi publik yakni [ppid.singkawangkota.go.id](http://ppid.singkawangkota.go.id) dan [lapor.go.id](http://lapor.go.id). Pemohon informasi pada tahun 2022 sebanyak 13 pemohon saja.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Melakukan sosialisasi, membuat infografis dan videografis agar pesan yang dibuat mudah tersampaikan ke masyarakat.

### **3. Sasaran Strategis Meningkatnya keamanan informasi**

#### **a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;**

Tabel 3.7.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	29 PD	29 PD	100%

Pada Sasaran Meningkatnya keamanan informasi dengan Indikator Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah target Tahun 2022 adalah 29 PD realisasinya adalah 29 PD yang berarti capaiannya adalah 100%.

Salah satu wujud Ekosistem Digital Terpercaya adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi individu, organisasi, dan server milik masyarakat dan pemerintah setelah melalui proses verifikasi identitas. Sertifikat Elektronik inilah yang digunakan dalam berbagai layanan digital terpercaya seperti untuk Tanda Tangan Elektronik, Segel Elektronik, Penanda Waktu Elektronik, dan lain-lain. Untuk itu Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021, telah melakukan kerjasama dengan BSrE / BSSN (Badan Sertifikasi Elektronik / Badan Siber Sandi Negara) dalam penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik). Pada tahun 2022, semua perangkat daerah di Kota Singkawang sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

**1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Tabel 3.8.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya keamanan informasi	Peningkatan dan Pengembangan Persandian	36.031.500	34.213.828	94,95	100%	5,05%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,95% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 5,05%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
  - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.9.

Perbandingan realisasi kinerja 2020, 2021, 2022 dengan target akhir 2022

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>REALISASI</b>			<b>TARGET 2022</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	1 PD	24 PD	29 PD	29 PD

Adapun untuk Sasaran ketiga yakni Meningkatkan keamanan informasi dengan Indikator Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah, realisasi pada tahun 2020 hanya 1 PD yakni Dinas Komunikasi dan Informatika dan realisasi pada tahun 2021 adalah 24 PD. Untuk tahun

2022 semua perangkat daerah di Kota Singkawang sebanyak 29 PD sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indikator Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah mencapai target yakni 1 OPD (Dinas Kominfo). Untuk tahun 2020 pengamanan informasi perangkat daerah baru bisa dilaksanakan pada Dinas Kominfo saja mengingat Bidang Persandian baru dibentuk pada tahun 2020 berdasarkan Perwako Singkawang Nomor 6 Tahun 2020. Untuk tahun 2021 ditargetkan pengamanan informasi perangkat daerah bisa dilaksanakan pada 24 OPD. Untuk tahun 2022 semua perangkat daerah di Kota Singkawang sebanyak 29 PD sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

**4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;**

Tabel 3.10.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	100%
Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	-



Pada Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 2 indikator untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :

1. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target Tahun 2022 adalah BB dan untuk realisasi di Tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu “BB dengan nilai 77,97, dimana Dinas Kominfo meraih Peringkat Ketiga” dari 29 perangkat daerah se-Kota Singkawang. Namun pencapaian di Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021 dimana Dinas Kominfo mendapatkan nilai 82,14% dengan kategori A dengan peringkat Terbaik Pertama dari 29 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
2. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2022 adalah BB. Sedangkan untuk realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu B, namun Dinas Kominfo berhasil meraih Peringkat Kedelapan dari 29 perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Pencapaian di Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021 dimana pada Tahun 2021 Dinas Kominfo mendapatkan nilai BB.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

**1) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;**

Tabel 3.11.

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.427.931.650	4.240.319.883	95,76	100%	4,24%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,76% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efesiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 4,24%.

**2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian 100%.
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian 100%.
  - Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah capaian 100%.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian 100%.
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian 100%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.12.

Perbandingan realisasi kinerja 2020, 2021, 2022 dengan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2022
		2020	2021	2022	
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	A	BB	BB
	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	BB	B	BB

Adapun untuk Sasaran keempat yakni Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah, realisasi tahun 2020 tidak dapat diukur perbandingannya dikarenakan sasaran tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2021.

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan upaya serta langkah memperkuat lembaga dalam menjawab tantangan di era globalisasi. Dibangun komitmen pada lingkungan semua ASN bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menyederhanakan struktur birokrasi tetapi mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi khususnya dalam manajemen administratif di

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan kedepan yang harus diselesaikan, diantaranya :

1. Masih terdapat ASN yang belum komitmen dalam melaksanakan perubahan;
2. Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;
5. Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
6. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik.

Hal-hal tersebut di atas menjadi beberapa kendala sehingga penerapan perubahan yang sesungguhnya belum sepenuhnya optimal. Kendala-kendala tersebut di atas dihadapi oleh ASN pada Dinas Kominfo sebagai dampak dari luar.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan meliputi Perhitungan Anggaran ( PA ) Neraca dan Laporan Arus Kas atas pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2022, periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut disajikan realisasi atas anggaran pendapatan maupun anggaran belanja berdasarkan angka realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada akhir tahun 2022.

### **1. Pendapatan Tahun 2022**

**Tabel 3.13. Realisasi PAD Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	452.410.000,00	100,54

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan retribusi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang melebihi target yang ditetapkan, yaitu Rp. 452.410,00 atau sebesar 100,54% dari target pendapatan sebesar Rp.450.000.000,00.

## 2. Realisasi Belanja

Belanja Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2022 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.14. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
		( Rp )	( Rp )	( Rp )	
1.	Belanja Operasi	7.196.334.650	6.845.039.617	351.295.033	95,11
2.	Belanja Modal	448.637.200	437.936.093	10.701.107	97,61
	Jumlah	<b>7.644.971.850</b>	<b>7.282.975.710</b>	<b>361.996.140</b>	<b>95,26</b>

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.15. Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.212.416.300	100	1.117.448.495	92,16
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.794.151.200	100	1.730.314.892	96,44
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	174.441.200	100	160.678.612	92,11
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFOMASI	36.031.500	100	34.213.828	94,95
<b>JUMLAH</b>		<b>3.217.040.200</b>	<b>100</b>	<b>3.042.655.827</b>	<b>94,57</b>

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : realisasi tidak melebihi anggaran. Selain itu berdasarkan skala pengukuran ordinal realisasi dari pelaksanaan seluruh program bisa dikatakan berhasil.

## BAB IV

### PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2022 ini, merupakan bentuk laporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Laporan Kinerja Tahunan melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan dengannya, yaitu APBD dan Arah Kebijakan Umum (AKU) bidang kominfo yang dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

Berdasarkan dokumen tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran yang menjadi perhatian utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Program-program dari sasaran yang termasuk dalam kategori **berhasil** adalah :

- Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- Program Aplikasi Informatika;
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;



- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah di tuangkan dalam RKA-SKPD / DPA-SKPD / DPPA-SKPD tahun 2022 sebesar Rp. 7.644.971.850,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.282.975.710,00 atau 95,26% dari *plafond* anggaran.

Berdasarkan nilai capaian sasaran, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang telah berhasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya upaya keras dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika serta dukungan dan partisipasi insan kominfo maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian capaian tersebut dirasa belum optimal baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan program kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi, diantaranya :

- Perencanaan Strategis SPBE : Belum memuat Security System dan Management Data;
- Teknologi Informasi dan Komunikasi : Pembangunan aplikasi SPBE terutama belum adanya detail konsultasi dengan fungsi pengelolaan TIK;
- Tim koordinasi SPBE : Maturity Level belum matang;
- Penerapan Manajemen SPBE : belum memiliki manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan;
- Audit TIK : Pemkot Singkawang masih belum memiliki penerapan dalam hal Audit TIK yang terkait audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan;
- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik : Layanan Kinerja Pegawai dimana bukti dukung penerapan masih menunjukkan tahap yang belum matang;

- Layanan Publik Berbasis Elektronik : pemanfaatan JDIH belum menunjukkan kapabilitas fungsi teknis, validasi produk hukum dan tanda dengan digital;
- Rendahnya gaji tenaga honorer yang mengelola TIK, dimana gajinya masih disama ratakan dengan gaji tenaga honorer umum dan masih dibawah UMR Kota Singkawang. Hal ini berakibat Dinas Kominfo kehilangan tenaga programmer;
- Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang terhadap peranan komunikasi dan informatika;
- Server 20 (Kondisi Baik 13, Kurang baik 7, Rusak 2);
- Kapasitas Bandwitdh Utama kurang (perlu tambahan);
- Bandwitdh Dedicated tanpa back up;
- CCTV belum semua FO;
- Kendaraan Operasional untuk pengendalian Menara telekomunikasi dan jaringan intra.

Dalam upaya mengoptimalkan capaian sasaran tahun 2022 dan mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana diatasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal;
2. Dalam tugas-tugas operasional lapangan dan atau penertiban, penugasan staf tidak terbatas hanya dari satu bidang saja tetapi melibatkan staf dari bidang lain dan sekretariat;
3. Memberi kemudahan bagi staf Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan/penyediaan sarana seperti CCTV publik, *hotspot*, FO dll;

5. Memaksimalkan pengelolaan *Telematic Control Management (TCM) Room* agar dapat berfungsi dengan optimal;
6. Meningkatkan koordinasi dalam membangun komitmen *stakeholder* dan OPD terkait dalam mengintegrasikan aplikasi yang sudah dan akan diadakan/dikembangkan;
7. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten lain (sekitar) dibidang Komunikasi dan Informatika, Bidang *E-Government* dan Telematika dan Bidang Statistik dan Persandian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat.

Dinas Komunikasi dan Informatika mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang didasarkan atas keikhlasan sangat kami harapkan untuk dapat mewujudkan Kota Singkawang menjadi **"SINGKAWANG HEBAT"**.

Singkawang, 14 Februari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



**EVAN EFNANDA, S. Kom**

Pembina

NIP. 19710312 200502 1 001